

DINAMIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT

Sri Rahayu Wilujeng¹, M. Mukhtasar Syamsuddin², Rr. Siti Murtiningsih³

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia ¹²³

wilujengsrirahayu@gmail.com¹, etsar@ugm.ac.id², stmurti@ugm.ac.id³

Abstract

This study aims to describe the history of education in Indonesia in general terms, educational policies at any time, and to describe education in Indonesia from a philosophical perspective. This research is a philosophical study of the actual problem, namely education. In this study, a linear method was used through several stages, namely perception, reflection, and conception. The elements of the method used are interpretation, analysis-synthesis, historical continuity, and idealization. The result is an education in Indonesia is increasingly leading to a positivistic ontology of education and increasingly losing its humanistic orientation because it sees humans as not as a whole. Education pays more attention to cognitive aspects and ignores other aspects. Pragmatism values in education are getting stronger in the reform era. Education is a program to prepare students to meet industrial needs. There was a reduction in the meaning of education, whose essence is cultural activity into economic activity. Education only makes humans become homo fabers. Education eliminates the opportunity for humans to become fully human. Education as a typical human activity is far more meaningful than just creating labor. Education is an effort to humanize humans.

Keywords: education; human; philosophy; pragmatism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejarah pendidikan di Indonesia secara cara umum, kebijakan pendidikan pada setiap jaman, dan pendidikan di Indonesia dari perpektif filsafat. Penelitian ini adalah penelitian filsafat atas masalah aktual yaitu pendidikan. Dalam penelitian ini digunakan metode linear dengan melalui beberapa tahap yaitu persepsi, refleksi dan menyusun konsepsi. Unsur-unsur metode yang digunakan adalah interpretasi, analisa-sintesa, kesinambungan historis, dan idealisasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan di Indonesia semakin mengarah kepada ontologi pendidikan positivistik dan semakin kehilangan orientasi humanistiknya karena melihat manusia tidak secara utuh. Pendidikan lebih memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan aspek lainnya. Nilai-nilai pragmatisme dalam pendidikan semakin menguat pada era reformasi. Pendidikan sebagai program untuk menyiapkan anak didik untuk memenuhi kebutuhan industri. Terjadi reduksi makna pendidikan yang esensinya adalah aktivitas budaya menjadi aktivitas ekonomi. Pendidikan hanya mencetak manusia menjadi *homo faber*. Pendidikan menghilangkan kesempatan manusia menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai suatu aktivitas khas manusia jauh lebih bermakna dari sekedar mencetak tenaga kerja. Pendidikan adalah upaya memanusiaikan manusia.

Kata Kunci: pendidikan; manusia; filsafat; pragmatisme

Pendahuluan

Kehidupan bangsa Indonesia telah melewati sejarah panjang. Dalam perjalanan kehidupan itu ada beberapa

peristiwa penting yang menjadi tonggak perubahan. Peristiwa penting yang terakhir adalah reformasi tahun 1998. Perubahan ini terjadi di segala aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya,

pertahanan-keamanan, dan keagamaan. Reformasi telah berhasil menggantikan pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau penguasa secara signifikan berkurang. Pemerintah bekerja di bawah pengawasan beberapa lembaga negara yang resmi dan lembaga-lembaga masyarakat. Reformasi memberi harapan kepada masyarakat bagi terwujudnya tatanan kehidupan baru yang lebih baik (Kaelan, 2007: 20).

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tetapi harapan masyarakat Indonesia belum terwujud. Kekerasan justru semakin masif dilakukan oleh masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Kekerasan semacam ini lebih susah ditangani karena bisa berkembang ke arah yang tidak jelas. Beberapa masalah besar lain belum teratasi. Masalah tersebut adalah korupsi, konsumerisme, primordialisme kesukuan, radikalisme agama, dan intoleransi.

Gerakan reformasi yang menuntut kebebasan ini tanpa disertai dengan konsep yang jelas tentang tatanan format kehidupan bernegara termasuk bidang pendidikan. Gerakan reformasi telah menghasilkan suatu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia liberal dan kehilangan arah. Menurut Doni Koesoema seorang ahli dan peneliti pendidikan menyebut zaman ini adalah zaman *keblinger* (Koesoema, 2011: 21).

Mengapa kehidupan masyarakat Indonesia sekarang menjadi seperti ini? Apakah kondisi ini ada kaitannya dengan masalah pendidikan? Kekacauan kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini memang tidak semata-mata problem pendidikan tetapi pendidikan bisa menjadi jalan keluarnya. Tugas pendidikan adalah menyadari adanya kepincangan-kepincangan yang terjadi di masyarakat

yang diakibatkan oleh berbagai kekuatan (Tilaar, 2016: 23) Pendidikan adalah benih harapan. Di lingkungan masyarakat dimana sedang terjadi kegelapan, keterbelakangan, kekacauan, maka sandaran pamungkasnya adalah pendidikan (Latief, 2020,: xv) Pendidikan adalah upaya menyiapkan generasi penerus untuk dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia yang kompleks. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membekali manusia dengan kemampuan agar bisa menyelesaikan masalah, melangsungkan kehidupan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya di masa yang akan datang.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini kemajuan dalam kehidupan material terjadi peningkatan. Pembangunan fisik meningkat pesat, pendapatan masyarakat bertambah, di sisi lain kualitas kehidupan mental spiritual dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural mengalami penurunan. Filosofi pembangunan yang positivistik memberikan kemajuan yang semu, karena hanya membangun raga manusia dan kebutuhan materialnya. Kemajuan bidang fisik material tidak akan ada manfaatnya jika mental dan karakter manusia tidak diperhatikan. Dalam syair lagu Indonesia Raya, salah satu baris tertulis "Bangunlah jiwanya bangunlah raganya". Membangun dan menyiapkan manusia untuk mempunyai jiwa, mental, karakter yang baik harus menjadi perhatian utama, karena jiwa yang menggerakkan manusia.

Pendidikan adalah bidang yang sangat penting bagi gerakan perubahan. Pendidikan adalah syarat utama bagi terwujudnya kemajuan. Pendidikan menjadi motor perubahan global yang radikal (Tilaar, 2016: 5). Sejarah menunjukkan, semua bangsa bisa mencapai lewat pendidikan. Yunani Kuno memulai kemajuan dengan pendidikan.

Jerman menjadi bangsa yang besar lewat tradisi pendidikan yang mapan. Inggris memotori revolusi Industri lewat pendidikan. Revolusi industri inilah yang menjadikan Inggris bangsa besar. Amerika menjadi bangsa yang besar dengan mengirim warganya untuk belajar di Jerman dan Inggris. Bangsa Jepang bisa menjadi bangsa yang maju lewat pendidikan. Jepang mengirim ribuan warganya untuk bersekolah di Eropa. Malaysia dan Singapura menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara lewat pendidikan.

Sejarah bangsa Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai pengaruh yang besar bagi terbentuknya masyarakat Indonesia. Corak manusia dan masyarakat yang dominan pada jaman itu merupakan produk dari pendidikan, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan suatu masa tertentu akan melahirkan manusia atau masyarakat yang berbeda dengan zaman lain.

Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan bahwa faktor penting dalam pendidikan adalah filosofi yang menjadi dasar bagi pendidikan tersebut. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila (Sutono, 2015: 666). Filosofi yang menjadi landasan suatu sistem pendidikan sangat berpengaruh atas model manusia yang dihasilkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah landasan filosofis itu dipergunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari filsafat karena pendidikan berkaitan dengan hal-hal mendasar dari kehidupan manusia.

Penelitian ini membahas permasalahan Sejarah pendidikan di Indonesia dan tinjauan filosofis atas dinamika pendidikan yang terjadi.

terutama era reformasi? Dua pertanyaan ini berusaha dijawab dengan mengamati fenomena pelaksanaan pendidikan secara umum dalam realitas kehidupan masyarakat, dan filosofi pendidikan yang mendasari politik pendidikan baik dalam bentuk aturan maupun kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian filsafat dengan model penelitian masalah aktual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Bahan kajian atau materi yang dianalisis berasal dari buku Kebijakan Pendidikan tulisan Tilaar, dan Pendidikan Yang Berkebudayaan tulisan Yudi Latief. Tahap metode yang ditempuh sebagai berikut; pertama tahap persepsi dilakukan terhadap objek penelitian yaitu pendidikan. Persepsi dilakukan atas data yang sudah terkumpul.

Tahap ke dua dilakukan refleksi. Refleksi adalah proses pengolahan data. Dilakukan analisa kritis atas permasalahan sampai ditemukan intisari. Unsur-unsur metodis dari tahap ini yaitu: interpretasi, sintesa, kesinambungan historis, idealisasi. Interpretasi. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan data. Selanjutnya dilakukan sintesa untuk menemukan problem besar utama dan dilanjutkan dengan analisa. Analisa ini dilakukan dalam kaitannya dengan kesinambungan historis dalam rentang waktu tertentu untuk menemukan hal-hal mendasar dari tiap periode. Selanjutnya dilakukan idealisasi atas data yang sudah diolah. Idealisasi dilakukan dalam rangka membangun suatu konsep sebagai suatu alternatif solusi dari permasalahan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Garis Besar Sejarah Pendidikan Indonesia

Proses pendidikan yang dilakukan manusia sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan ini tidak hanya dimiliki oleh manusia modern dengan model pendidikan yang kompleks. Kesadaran ini sudah muncul pada masyarakat atau bangsa-bangsa Kuno di berbagai belahan bumi. Epos India Kuno Mahabarata pada dasarnya bukan hanya menceritakan tentang peperangan, tetapi mengandung ajaran baik dan buruk yang dihasilkan dari pendidikan. Bangsa India Kuno telah melakukan pendidikan secara lisan tentang pedoman hidup 1000 tahun Sebelum Masehi. Permulaan abad ke lima Sebelum Masehi Budha mengajarkan tentang rahasia hidup dan tujuan akhir hidup. Atas usahanya menjajarkan pada semua bangsa Budha dijuluki sebagai pendidik rakyat. Pada abad ke enam Sebelum Masehi di Cina lewat Kong Fu Tze dan Lao Tze telah memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang tata terbib hidup, kewajiban dan kehidupan yang baik. (Komar, 2006: 37-38)

Tradisi Cina yang ditopang dengan sistem pendidikan modern sekarang mampu mencetak manusia yang gigih dengan etos kerja yang tinggi. Sementara di Jepang pendidikan dengan semangat Bushido telah mampu mencetak manusia yang disiplin, pantang menyerah, mempunyai rasa malu tinggi, setia kepada negara. Sikap mental seperti ini membawa bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju, mandiri tanpa tercabut dari kebudayaan dan tradisi. Di lain tempat gaya pendidikan Sparta membentuk manusia yang kuat dan tangguh, sementara tradisi pendidikan Athena membentuk masyarakat yang bisa

hidup bersama dalam sistem demokrasi yang harmonis. Pendidikan dilaksanakan di dalam gymnasium yang bebas agar tercipta harmonisasi antara jasmani dan rohani.

Sejarah pendidikan di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum jaman kolonial. Pendidikan tradisional sudah dilakukan sejak jaman Hindu-Budha. Dengan model pendidikan guru-kulo berlanjut pada jaman kerajaan Islam di Indonesia (Adit, 2020). Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pembentukan karakter. Karakter murid digembleng agar mempunyai mental dan spiritual yang kuat. Membimbing manusia agar mempunyai karakter baik adalah tujuan utama pendidikan sedangkan ketrampilan dan pengetahuan sebagai kompetensi yang menyertai. Pendidikan di masa tradisional dilakukan di padepokan, perguruan, pesantren, ataupun tempat ibadah.

Benih-benih pendidikan modern di Indonesia mulai muncul sejak jaman penjajahan. Pendidikan jaman Belanda dilaksanakan sebagai konsekuensi dari politik etis. Politik etis adalah politik balas budi Belanda kepada bangsa Indonesia yang telah memberikan kesejahteraan dan kekayaan. Masyarakat Indonesia secara terbatas diberi kesempatan mengenyam pendidikan baik ditanah air maupun di luar negeri. Belanda memberikan kesempatan orang Indonesia mengenyam pendidikan sangat terbatas dan tidak adil. Hanya orang keturunan bangsawan yang boleh sekolah. Pemerintah Belanda menyadari kalau pendidikan dibebaskan secara luas maka akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia.

Kebijakan pendidikan ini pada dasarnya tidak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia tetapi untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan terampil dengan upah murah. Pendidikan yang baik

akan memperkuat kaum pribumi dalam administrasi juga dalam usaha-usaha pembangunan lain (Fudyartanta, 2020: 128). Pendidikan masa mulai menunjukkan orientasi pragmatis. Pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda sesungguhnya tidak ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pendirian ini ditujukan untuk kepentingan praktis Belanda kolonial yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan tenaga pada perusahaan swasta Belanda (Kemendikbud, 2013: 2).

Haluan pendidikan Belanda tetap menunjukkan sifat kolonialnya. Sebagaimana kebijakan pendidikan dari negara-negara Eropa, ontologi pendidikan positivistik sebagai landasan pendidikan sangat kuat. Pendidikan Belanda menekankan pengetahuan terutama pengetahuan ilmu-ilmu positif.

Pendidikan kolonial tidak menyertakan dimensi kebudayaan. Pendidikan ini tidak mempunyai cita-cita kebudayaan, apalagi kebudayaan Indonesia. (Fudyartanta, 2020: 128). Pendidikan yang sekuleristik menyadarkan kaum terpelajar bahwa pendidikan Belanda sangat tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai spiritualitas dan tradisi kebudayaan yang mengakar kuat. Dari sini muncul kesadaran bahwa orang Indonesia membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Kaum terpelajar mulai mendirikan lembaga pendidikan.

Pendidikan dengan segala proses dan interaksinya telah membangkitkan rasa kebangsaan. Terlepas dari motivasi Belanda. Pendidikan jaman ini melahirkan manusia-manusia yang tekun mencari ilmu, cinta terhadap profesi, sederhana mempunyai integritas moral yang tinggi dan kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat.

Selanjutnya Indonesia dikuasai Jepang. Jepang memberi kesempatan yang lebih luas. Ada beberapa tingkatan pendidikan, *Kukomin Gakko* atau Sekolah Rakyat setingkat SD, *Shoto Cho Gakko* (Sekolah Menengah Pertama), *Koto Cho Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi), *Kagyo Gakko* Sekolah Kejuruan (Adit A, 2020). Pendidikan Jepang bersifat militeristik dan sangat keras. Bagi bangsa Jepang kesetiaan sangat penting bagi semua warga. Kesetiaan paling tinggi adalah kesetiaan pada negara. Model pendidikan Jepang dengan semangat Bushidonya menumbuhkan semangat patriotisme tinggi, percaya diri, mental yang kuat, semangat juang yang tinggi. Pendidikan Jepang ini sangat berpengaruh terhadap karakter pemuda Indonesia. Semangat nasionalisme dan patriotisme ini masih terasa pada sistem pendidikan nasional sampai akhir tahun lima puluhan (Buchori: 2020: 245).

Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945 kemudian dibentuk Departemen Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan. Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri DPP&K yang pertama. Pemikiran Ki Hadjar memberikan dasar bagi pengembangan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Ia adalah Ketua Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran dan bersama sama dengan panitia lain anggota PPKI. Panitia ini bertugas membuat rencana pokok-pokok cita-cita pendidikan dan pengajaran Indonesia. (Fudyartanta, 2020: 131-133)

Ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan sangat berpengaruh pada masa ini. Pengertian pendidikan dibedakan dengan pengajaran (Dewantara, 2013: 20). Pendidikan mempunyai cakupan yang lebih luas dan makna yang dalam. Pendidikan adalah tuntunan hidup. Pendidikan adalah usaha menuntun anak agar bisa tumbuh berkembang dengan

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kekuatan kodrat adalah kekuatan kodrat dalam hal ini mencakup kekuatan lahir dan batin (Dewantara, 2013: 20). Pendidikan harus mengembangkan aspek-aspek manusia secara utuh yaitu akal (logika), rasa (estetika), dan kehendak (etika). Semua aspek jiwa dan raga harus dikembangkan secara seimbang. Maksud dari pendidikan adalah kesempurnaan hidup sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin (Dewantara, 2013: 94)

Pendidikan diatur dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran juncto UU No. 12 tahun 1954. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Darmaningtyas, 2004: 173). Pendidikan juga mewujudkan manusia yang bebas yang mampu mengambil keputusan dan tindakan, sekaligus mampu bertanggung jawab. Pendidikan mampu membuat manusia hidup secara beradab.

Pada masa orde lama pendidikan karakter dan budi pekerti mendapatkan perhatian yang besar. Karakter yang kuat dengan integritas moral yang baik dan mental yang tangguh sangat dibutuhkan bagi Indonesia yang sedang meneguhkan eksistensi bangsa dan negara.

Tahun 1966 terjadi pergantian pemerintahan. Orde Baru mulai berkuasa. Kebijakan pendidikan yang disusun juga sangat diwarnai corak pemerintahan. Pergantian pemerintahan berimplikasi pada perubahan dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPRS/No. XXVII/MPRS/1966 tujuan pendidikan adalah untuk membentuk

manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Orde baru mempunyai perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan di awal pemerintahan. Pendidikan merupakan program penting dalam pembangunan. Hal ini terlihat pada GBHN tahun 1973. Kebijakan pendidikan pada jaman orde baru menjadi lebih sistematis. GBHN tahun 1973 ini merupakan program pembangunan lima tahun pertama dari pembangunan jangka panjang tahap pertama.

Pendidikan sebagai bagian dari pembangunan yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya (Depdikbud, 1987: 320). Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah tetapi juga batiniah, tidak hanya menyangkut aspek fisik tetapi juga mental spiritual. Pendidikan sebagai salah satu bidang penting pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Orde Baru melihat pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Hal ini tertuang dalam GBHN (Depdikbud, 1987: 320).

Sistem pendidikan nasional jaman orde baru tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989. Dalam UU ini ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan P4 (Pedoman Panghayatan Pengamalan Pancasila). Pada pasal 4 disebutkan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kebangsaan dan kemasyaratan.

Ada dua misi dari pendidikan jaman orde baru: pertama mencetak manusia Indonesia yang mempunyai kecakapan dan ketrampilan handal sehingga mampu bersaing di era global, kedua manusia Indonesia yang unggul harus tetap berakar pada kebudayaan, filsafat dan ideologi Pancasila. Orde baru masih memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan karakter. Materi pendidikan tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan tetapi juga membangun karakter.

Pemerintahan orde baru menekankan pendidikan moral baik moral Pancasila maupun moral agama. Murid tidak akan naik kelas jika nilai agama atau nilai Pendidikan Moral Pancasila merah. Nilai agama dan nilai PMP tidak hanya ditetapkan dari segi pengetahuan saja tetapi juga penilaian atas sikap dan tingkah laku siswa. Siswa tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan. Pendidikan Moral Pancasila merupakan materi yang wajib diberikan kepada siswa pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Selain itu Pendidikan pendahuluan bela negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Fudyartama, 2010: 358-359).

Pada tahun 1987 mulai diadakan evaluasi secara nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila menjadi salah satu materi yang diujikan dalam EBANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Mereka juga dididik agar mempunyai moral yang baik, mental yang kuat dan mempunyai tanggung jawab serta kepedulian terhadap masyarakat dan negara.

Dalam perkembangannya pendidikan jaman orde baru mengarah pada pendidikan yang positivistik. Berbeda dengan pemerintahan orde lama yang condong ke negara-negara sosialis, pemerintahan orde baru lebih dekat dengan negara-negara liberal. Filosofi pembanguan orde Baru yang positivistik dengan mentitik beratkan pada pembangunan ekonomi mempengaruhi konsep pendidikan yang dibuat. Positivisme sebagai suatu paradigma ilmu sosial yang dominan menjadi dasar model pendidikan liberal. (O' Niel, 2008: xv) Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar dari cita-cita Barat tentang individualisme. Ide politik liberalisme dalam sejarah pertumbuhannya berkaitan dengan kepentingan kapitalisme.

Pendidikan lebih mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antar murid. Pendidikan adalah transfer pengetahuan Materi pendidikan didominasi aspek kognitif mengutamakan pengetahuan. Luaran nyata dari pendidikan adalah manusia yang mempunyai kecakapan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia kerja atau industri. Pada masa Orde baru mulai dikenalkan gagasan *link and match* dalam pendidikan. Pendidikan harus memiliki kaitan dan relevansi dengan dunia industri (O' Niel, 2007: xi). Ini merupakan ciri ideologi pendidikan liberalisme. Unsur-unsur pragmatisme dan kapitalisme di dunia pendidikan mulai kelihatan.

Model pendidikan liberalisme ini diterapkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara Barat baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam tingkat kemakmuran. Pada jaman orde baru Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal ini bisa ditunjukkan pada peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan konsumsi pada semua barang,

perkembangan industri, pembangunan infra sturktur dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, pemerintahan orde baru semakin otoriter dan represif. Pendidikan menjadi cara alat untuk mengukuhkan kekuasaan. Model pemerintahan orde baru berimplikasi kepada dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan bidang pendidikan sangat sentralistik dan otoriter. Di satu pihak pemahaman tentang ideologi Pancasila semakin menguat tetapi di pihak lain terjadi kebekuan dalam dunia pendidikan. Ada kontrol yang ketat atas pelaksanaan pendidikan, sehingga tidak ada kebebasan dalam pendidikan. Dunia pendidikan dibersihkan dari pengaruh politik. Kebijakan NKK/BKK (normanilsasai Kehidupan Kampus/Badan Kegiatan Kampus menghapuskan kebebasan di dunia pendidikan. Tidak ada kebebasan akademis sangat diperlukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Pendidikan orde baru melahirkan generasi yang disiplin, patuh, dan tertib. Kreativitas dan kebebasan tidak dikembangkan dalam pendidikan.

Selanjutnya Reformasi tahun 1998 berhasil menurunkan pemerintahan orde baru. Pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Jaman reformasi tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah pendidikan. Pembangunan diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. RPJP ini memberi pedoman pada beberapa bidang. Ada 9 bidang yang mendapatkan prioritas (Bapenas, 2004). Rencana pembangunan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa, tetapi tidak mempunyai program dan arah yang jelas terhadap pendidikan. Pendidikan mendapatkan porsi yang sangat kecil merupakan bagian dari sub bagian pembangunan sumber daya

manusia. Pendidikan terpisah dari bidang kebudayaan. RPJP ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun oleh Presiden dalam bentuk program kerja.

Undang Undang No. 2 tahun 1989 jaman orde baru dianggap sudah tidak sesuai lagi diganti dengan Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional. Undang Undang ini tidak hanya menggantikan Sistem Pendidikan Nasional tetapi juga mengganti paradigma pendidikan nasional. Pendidikan Moral Pancasila dihapus di semua jalur dan jenjang pendidikan. Materi ini diganti pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan sistem pemerintahan.

Ada beberapa kebijakan penting dalam pendidikan di era reformasi: pertama penghapusan materi Pendidikan Moral Pancasila atau pendidikan Pancasila dilebur dalam PPKN, ke dua pendidikan berstandar internasional dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Beberapa organisasi masyarakat mengajukan *judicial review* terhadap pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional. Gugatan uji materi ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2013. Majelis Hakim MK menilai pembentukan sekolah bertaraf internasional berpotensi mengikis karakter nasionalisme dan bertentangan dengan keadilan serta pemerataan pendidikan. Penyelenggaraan Sekolah bertaraf internasional ini membutuhkan biaya besra sehingga hanya bisa dinikmati beberapa kalangan. (Tempo, 2013). Kebijakan ini menyebabkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap siswa dan sekolah. Siswa dengan nilai tinggi ditampung di Sekolah bertaraf

internasioanal ini sehingga sekolah biasa semakin ketinggalan. Hal ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan. Pendidikan semacam ini bertentangan dengan kepribadian dan budaya bangsa.

Perubahan ke tiga dibuka kesempatan lembaga pendidikan asing untuk menyelenggarakan pendidikan di wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dengan sistem pendidikan dari negara asal. BAB XVIII tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Pasal 64 terdiri dari 5 pasal memberi kesempatan lembaga dari negara lain menyelenggarakan pendidikan di wilayah Indonesia untuk rakyat Indonesia dengan sistem yang berlaku dari negara asal.

Pada jaman orde baru, lembaga asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Indonesia dengan sistem pendidikan dari negara asal. Pendidikan ini hanya terbatas bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, bukan untuk rakyat Indonesia.

Selanjutnya kebijakan penting era reformasi yang paling baru adalah konsep merdeka belajar. Filosofi merdeka belajar mengandung spirit untuk mengajarkan dan mendidik anak menjadi manusia yang merdeka pikirannya, merdeka batinnya dan merdeka tenaganya (Kusumaryono, 2019). Konsep ini untuk mengatasi kualitas pendidikan Indonesia yang rendah. Mutu pendidikan di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain. Hal ini merujuk pada skor PISA (Programme for International Assesment) yang dilakukan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Developmen (OECD) PISA adalah pengukuran atas mutu pendidikan berdasarkan pada kemampuan literasi, matematika dan sains atau ilmu alam (Kompas, 2019). Dari 3 kemampuan siswa Indonesia bidang sains berada pada

rangking 70, membaca rangking 72, matematika 72 dari 78 negara yang dinilai (Kompas, 2019). Kondisi ini membuat prihatin pemerintah. Disamping itu kualitas tenaga kerja yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan kurang terampil. Untuk mengatasi masalah ini pemerintahan hasil pemilu tahun 2019 mengambil kebijakan penting bidang pendidikan berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah menyusun suatu sistem pendidikan atau kurikulum yang bisa memenuhi lapangan kerja dan konsep merdeka belajar.

Refleksi Dinamika Pendidikan di Indonesia

Dari sejarah pendidikan telah terjadi pergeseran dari makna pendidikan. yang diamanatkan para pendiri negara. Pendidikan mulai kehilangan landasan filosofis dan tidak mempunyai orientasi yang jelas. Pendidikan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan semakin pragmatis. Pragmatisme pendidikan ini sudah muncul sejak jaman kolonial dan semakin menguat pada reformasi. Dehumanisasi dan dekulturnisasi melanda dunia pendidikan di Indonesia.

Pendidikan bukan lagi berorientasi pada terwujudnya manusia dengan segala pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan nasional sedikit demi sedikit telah kehilangan wataknya sebagai kekuatan kultural. Dalam waktu singkat masa reformasi memperlihatkan degradasi sistem pendidikan nasional (Buchori, 2000: 245).

Undang Undang No 20 tahun 2003 yang dibuat pada jaman reformasi secara nyata memberi gambaran pendidikan yang semakin jauh dari esensi dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pendidikan

bukan lagi sebagai aktifitas kultural dengan dasar filosofi Pancasila. Pendidikan tidak lagi upaya membangun manusia yang mental dan moral yang baik yang kuat yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Idealisme dalam pendidikan di Indonesia memudar. Ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan maupun materi yang diberikan di sekolah.

Pendidikan yang positivistik membawa anak didik menjadi manusia pintar dari segi pengetahuan tetapi lemah dari segi mental dan moral. Penghargaan yang tinggi diberikan pada ilmu matematika dan sains, sementara ilmu lain kurang diperhatikan. Hal ini terlihat jelas dari pembagian jumlah jam pelajaran dan evaluasi yang dilakukan baik ketika ada UN maupun Asesmen Kompetensi Minimal.

Dasar filosofi pendidikan sekarang bukan lagi kultural humanis, tetapi pragmatis ekonomis. World Trade Organisation menetapkan bahwa pendidikan digolongkan bidang jasa yang diliberalisasikan. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai komoditas, dan lembaga Pendidikan dianggap sama dengan perusahaan. Ketentuan WTO ini diakomodasi dalam pasal 64 Undang-Undang No 20 tahun 2003. Ketentuan yang tertuang dalam ini berpotensi untuk digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3.

Harus disadari bahwa tujuan pendidikan Indonesia berbeda dengan tujuan dari lembaga-lembaga asing. Masuknya lembaga asing bergerak di bidang pendidikan ini menimbulkan kompetisi yang tidak sehat dan akan mengancam lembaga pendidikan lokal yang seharusnya dilindungi. Pendidikan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan menyiapkan

tenaga untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tuntutan perusahaan nasional dan internasional berusaha dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Penekanan aspek ekonomi dalam pendidikan ini dikritik para penggagas pedagogi kritis. Pendidikan dipersempit untuk memenuhi kepentingan bisnis dan industri serta mengabaikan tujuan pendidikan lain yang lebih luas dan dalam. (Watimena, 2015) Pendidikan harus dilandasi tanggung jawab moral menumbuhkan tanggung jawab moral, yaitu terwujudnya keadilan, keteraan dan harapan. Tujuan tertinggi dari pendidikan adalah membantu manusia menjalani hidup yang bermakna (Watimena, 2015).

Pendidikan yang diharapkan menjadi solusi atas berbagai masalah dan kekacauan yang terjadi di Indonesia ternyata tidak banyak berperan. Pendidikan sekarang justru memunculkan masalah baru. Pendidikan yang dilandasi pragmatisme ini tidak mampu mencetak manusia-manusia idealis yang mempunyai integritas moral, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap sesama, masyarakat dan negara. Manusia yang dilahirkan dari pendidikan yang pragmatis akan menjadi manusia pragmatis yang mengakibatkan sikap individualis dan hedonis.

Pada masa diberlakukannya UN, semua perhatian siswa, guru dan sekolah tertuju pada mata pelajaran yang diujikan, sementara ilmu-ilmu seperti Agama, PPKN, seni, dan lain-lain diabaikan. Ilmu yang menjadi dasar pembentukan karakter diabaikan. Pendidikan hanya memberi pengetahuan, mengasah ketrampilan. Pendidikan memberi ruang yang luas untuk aspek kognitif manusia. Hal ini dapat dilihat dari reaksi pemerintah atas hasil skor PISA. Hasil evaluasi skor PISA dijadikan acuan bagi penilaian mutu pendidikan di Indonesia.

Skor PISA selayaknya dijadikan pertimbangan, bukan sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan. Hasil skor PISA tersebut memprihatinkan, tetapi Indonesia tidak perlu panik dan khawatir. Suatu hal yang sangat wajar jika kemampuan siswa Indonesia di 3 materi (literasi, matematika dan sains) kalah dengan negara lain. Materi yang dipelajari siswa Indonesia jauh lebih banyak dari negara-negara lain. Sebagai contoh siswa SMP di Indonesia untuk pelajaran Bahasa mendapatkan 3 mata pelajaran, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah bahasa lain jika mereka bersekolah di sekolah berbasis agama. Adalah logis, siswa Indonesia yang mempunyai beban pelajaran yang lebih banyak dan berat kalah jika dibandingkan dengan siswa dari negara lain dengan jumlah materi pelajaran lebih sedikit. Keberhasilan pendidikan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan literasi, matematika dan sains.

Pendidikan jauh lebih luas dari pengajaran yang hanya memberikan pengetahuan. Pada akhirnya keberhasilan pendidikan itu adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkarakter dan bermoral baik, religius, humanis, cinta tanah air, menghargai kelompok lain dan bersifat sosial. Inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan yang berlandaskan Pancasila sebagai *core value*. Manusia digerakkan oleh karakternya. Dengan karakter baik, maka ilmu dan ketrampilan yang dimiliki akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sesama. Sebaliknya dengan karakter buruk, maka ilmu dan ketrampilan yang dimiliki akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bahkan negara.

Pendidikan adalah upaya memanusiaakan manusia, agar manusia hidup secara beradab dalam tatanan nilai yang berlaku di sekitarnya. Tanpa pendidikan manusia bisa menjadi biadab dan bisa lebih jahat dari binatang.

Pendidikan adalah proses hominisasi dan humanisasi. Manusia untuk hidup bersama dengan manusia lain harus mengangkat dirinya ke taraf manusia. Ini proses memanusiaakan dirinya. Inilah proses *hominisasi* dan *humanisasi* (Driyarkara, 2006: 366-367). Kehidupan manusia ini penuh dengan nilai yang harus ditaati. Kehidupan manusia jauh lebih rumit dari kehidupan binatang. Manusia bukan hanya sebagai *animal rationale*. Manusia yang mempunyai kemampuan akal yang hebat kalau tidak mampu memanusia maka hanya akan tinggal menjadi binatang. Di alam modern ini banyak manusia-manusia yang turun menjadi binatang karena tidak mampu berperilaku sebagai manusia.

Pada era reformasi ini pendidikan tereduksi menjadi pengajaran. Pendidikan juga tereduksi hanya menjadi pelatihan. Pragmatisme dalam pendidikan dengan melibatkan modal yang besar menyiapkan siswa untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Materi yang diberikan di lembaga pendidikan adalah apa yang dibutuhkan. Kepentingan praktis ini akan membuat pendidikan semakin jauh dari esensinya. Suatu sistem pendidikan dengan landasan Ideologi pendidikan liberalisme berpendapat bahwa pendidikan bertujuan menyiapkan anak muda untuk menghadapi dunia kerja. Mereka diajari kerja keras. Mereka disiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri (Curren, 2007: 11) Pada tahap inilah kapitalisme mulai mengendalikan dunia pendidikan. Dalam konteks ini manusia hanya sekedar *homo economicus*. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya. Pragmatisme pendidikan menempatkan manusia hanya *homo economicus* atau *homo faber*, padahal sebagai manusia bisa meningkatkan taraf tinggi yaitu menjadi *homo socius, homo eticus, homo religiosus*.

Kecenderungan pragmatisme masyarakat dalam memahami pendidikan

semakin kuat. Pragmatisme sebagai epistemologi adalah metode untuk menguji suatu kebenaran dengan melihat akibat praktis yang ditimbulkannya. Sesuatu dapat diterima sebagai kebenaran jika bermanfaat secara praktis maka. Pragmatisme sebagai metode menghasilkan suatu parameter kebenaran. Sesuatu dianggap benar jika mempunyai akibat-akibat praktis dalam kehidupan. Pragmatisme adalah suatu sikap, metode dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai suatu ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran (Titus, 1984: 340-341). Epistemologi pragmatisme ini berkaitan dengan etika hedonisme dan konsumerisme. Pendidikan yang berlandaskan pada pragmatisme akan melahirkan manusia pragmatis. Pendidikan semakin kehilangan arah kecuali arah menuju kebebasan.

Pendidikan yang sekarang berlangsung sangat jauh dari esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan juga tidak sudah meninggalkan hakekat manusia sebagai *animal educandum* yang sekaligus *animal educabile*, binatang yang membutuhkan pendidikan dan binatang yang dapat dididik (Komar, 2001: 18) Pendidikan yang hanya bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga yang handal tetapi tanpa etika bukanlah merupakan proses pendidikan yang sebenarnya. (Tilaar, 2016: 25) Pendidikan itu dari dan untuk manusia. Manusia adalah makhluk multi dimensi. Dari susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa raga. Jiwa terdiri dari tiga aspek: akal, rasa dan kehendak. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. (Notonagoro, 1983: 94-96) Pendidikan yang hanya memberikan pengetahuan dan

ketrampilan akan menghasilkan manusia yang timpang.

Manusia itu *unfixed animal* yaitu makhluk yang belum berkepastian (Oong Komar, 2001: 95). Ia terus berkembang. Kebutuhan manusia semakin banyak baik jenis maupun jumlahnya. Manusia juga mempunyai keinginan, ambisi dan nafsu yang tidak terbatas. Berbagai kebutuhan baik material maupun imaterial tidak hanya harus dipenuhi tetapi harus dikendalikan. Inilah esensi perbedaan manusia dengan binatang. Binatang membutuhkan sesuatu, maka ia akan segera memenuhinya tanpa adanya pertimbangan, tetapi jika manusia membutuhkan sesuatu maka ia tidak harus selalu memenuhinya karena adanya nilai dan norma yang mengatur hidupnya. Pendidikan yang hanya memberikan kemampuan berupa pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan suatu kemunduran.

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam hidup. Pendidikan harus memberikan kesadaran bagaimana pengetahuan dan ketrampilan itu dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Hakikat kongkret pendidikan akhirnya menghasilkan suatu kecerdasan emosional, yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku agar sesuai dengan nilai asal mula dan tujuan kehidupan (Suhartono, 2007: 114). Kemampuan mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu sangat penting bagi manusia.

Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan adalah

proses menjadi manusia seutuhnya dengan belajar sepanjang masa. Pendidikan seharusnya mampu membangun manusia yang berbudaya, manusia yang hidup secara beradab didasari nilai-nilai kebersamaan, sosial, keadilan, dan cinta kasih. (Latif, 2020). Hakekat dari pendidikan itu adalah budi pekerti. Dengan budi pekerti maka manusia menjadi berbudaya. Pendidikan yang berkebudayaan yang mengupayakan kesatuan pikiran, perasaan dan kemauan untuk berbuat baik, benar dan indah (Latief, 2020:2)

Simpulan

Sejarah pendidikan Indonesia sejak jaman kolonial sampai dengan reformasi mengalami perubahan. Perubahan ini berkaitan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam perpektif filsafat, pendidikan semakin jauh dari hakekatnya yaitu menghasilkan manusia yang baik dan hidup bermakna. Terjadi reduksi pendidikan, dan reduksi ini semakin menguat pada era reformasi. Pendidikan tereduksi menjadi pengajaran dan ketrampilan.

Pendidikan didasarkan pada ontologi positivisme, epistemologi pragmatisme, etika individualisme dan ideologi pendidikan liberalisme tidak sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dilandasi etika sosial dan spiritualisme yang kuat. Pendidikan yang tidak sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia akan menghasilkan manusia yang kehilangan keindonesiaannya.

Pendidikan yang sekarang terjadi cenderung menghasilkan manusia yang pintar, individualis, pragmatis. hedonis yang menghargai materi secara berlebihan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelamatkan bangsa perlu evaluasi pendidikan secara menyeluruh sehingga pendidikan mempunyai arah yang jelas. Pendidikan harus ditekankan untuk membangun manusia Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, sehingga pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara.

Referensi

- Adit, Albertus. (2020). Berikut Lini Masa Sejarah Pendidikan di Indonesia, <http://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/22/6> [diakses pada 27 November 2020]
- Buchori, Mochtar. (2000). Reformasi Pendidikan dalam Pendidikan Nasional: Reformasi atau Revolusi, Jakarta, CSIS,
- Curren, Randall. (2007). Philosophy of Education. Victoria-Australia, Blackwell Publishing.
- Darmaningtyas. (2004). Membongkar Ideologi Pendidikan. Jogjakarta, Ar-Ruzz.
- _____, (2015). Pendidikan Yang Memiskinkan, Malang, Intrans Publishing.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2010). Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Jogjakarta, UST Press.
- Driyarkara, (2006). Karya Lengkap Driyarkara, Jakarta, Gramedia.
- Fudyartanta, Ki. (2010). Membangun Watak dan Kepribadian Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral, Yoyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harususilo, Yohanes Enggar. (2019). Skor Terbaru PISA Indonesia, <http://amp.kompas.com/edukasi/re>

- ad. [Diakses pada 28 November 2020)
- Kaelan. (2007). Memaknai Kembali Pancasila, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM.
- Kemendikbud. (2013). Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010-2025, Jakarta, Dirjen Dikti Kemendikbud .
- Kemendikbud. (2013). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, Jakarta ,Dirjen Dikti Kemendikbud.
- Koesoema A. Doni. (2011). Pendidikan Karakter di Jaman Keblinger Jakarta, Gramedia.
- Komar, Oong. (2001). Filsafat Pendidikan Non Formal, Bandung, Pustaka Setia.
- Latif, Yudi. (2020). Pendidikan Pemanusiaan, Kompas, 26 November 2020.
- Notonagoro. (1983). Pancasila Ilmiah Populer, Jakarta , Bina Aksara.
- O’Niel, William F. (2001). Educational Ideologies, Yogyakarta, terjemahan Omi Intan Naomi, Pustaka Pelajar.
- Suhartono, Suparlan, (2007), Filsafat Pendidikan, Yogyakarta , Ar-Ruzz.
- Sutono, Agus. (2015), Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional, Civis, V (1), DOI: <https://doi.org/10.26877>
- Suyato, Kusumaryono. (2019). Merdeka Belajar. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar> [Diakses pada 28 November 2020}
- Tempo. (2013). MK Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional. <https://nasional.tempo.co/read/452878> [Diakses pada 26 November 2020)
- Tilaar, H.A.R, dan Rian Nugroho. (2016), Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Titus, H., Smith and Nolan. (1984), Living Issues of Philosophy, terjemahan H.M. Rasjidi, Jakarta, Bulan Bintang.
- Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional. (1990). Jakarta ,Grafika.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. (2005). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Watimena, Reza A. (2015). Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux tentang Pendidikan dan relevansinya untuk Indonesia, Jurnal Filsafat, 28 (2), DOI: 10.22146/jf.34714